

**AKIBAT HUKUM BAGI TIMOR-LESTE SETELAH MERATIFIKASI
PIAGAM ASEAN BERDASARKAN STATUSNYA SEBAGAI ANGGOTA
PENUH ASEAN**

Oleh

Jessica Carina Baptista Ferreira

NIM 2214101211

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1). Menganalisis akibat hukum yang timbul bagi Timor-Leste setelah meratifikasi Piagam ASEAN sebagai konsekuensi keanggotaan penuh pada tahun 2025, (2). Mengkaji upaya serta strategi Timor-Leste dalam menghadapi hambatan dan tantangan implementasi kewajiban keanggotaan dalam organisasi regional tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, historis dan komperatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Ratifikasi Piagam ASEAN secara yuridis mewajibkan Timor-Leste untuk melakukan harmonisasi hukum nasional yang mencakup tiga pilar utama, yaitu pilar politik dan keamanan melalui kepatuhan pada prinsip demokrasi dan HAM, pilar ekonomi melalui penyesuaian regulasi perdagangan dan pasar tunggal, serta pilar sosial budaya melalui partisipasi aktif dalam mekanisme kerja sama antar masyarakat regional. (2). Dalam pelaksanaannya, Timor-Leste menghadapi tantangan multidimensi yang meliputi rendahnya kapasitas birokrasi dalam diplomasi politik, ketidaksiapan struktur ekonomi domestik menghadapi kompetisi pasar bebas, serta keterbatasan infrastruktur sosial budaya dan kelembagaan yang berpotensi menghambat pemenuhan kewajiban internasionalnya sebagai anggota penuh.

Kata Kunci: Timor-Leste, Piagam ASEAN, Ratifikasi, Akibat Hukum.

***LEGAL CONSEQUENCES FOR TIMOR-LESTE AFTER RATIFYING THE
ASEAN CHARTER BASED ON ITS STATUS AS A FULL MEMBER OF
ASEAN***

By

Jessica Carina Baptista Ferreira

Student ID 2214101211

Law Study Program

ABSTRACT

This research aims to (1). Analyze the legal consequences arising for Timor-Leste following the ratification of the ASEAN Charter as a result of its full membership in 2025, and (2). Examine Timor-Leste's efforts and strategies in addressing the obstacles and challenges of implementing membership obligations within the regional organization. This study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, historical and comparative approaches

The results of the study indicate that (1). The ratification of the ASEAN Charter legally mandates Timor-Leste to harmonize its national laws across the three main pillars: the political-security pillar through adherence to democratic principles and human rights, the economic pillar through the adjustment of trade regulations and the single market, and the socio-cultural pillar through active participation in regional community cooperation mechanisms. (2). In its implementation, Timor-Leste faces multidimensional challenges, including low bureaucratic capacity in political diplomacy, the unreadiness of domestic economic structures to face free market competition, and limited socio-cultural infrastructure and institutional frameworks, which potentially hinder the fulfillment of its international obligations as a full member.

Keywords: *Timor-Leste, ASEAN Charter, Ratification, Legal Consequences.*